

ABSTRAK

Isu utama yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah penumpukan perkara tindak pidana dapat menghambat dalam pelaksanaan administrasi, sehingga sangat diperlukan perubahan yang efektif dan realistis. Dengan berkembangnya zaman ilmu pengetahuan teknologi informasi baru yang sesuai, Kejaksaan RI telah melakukan reformasi birokrasi sebagai bentuk peningkatan kepercayaan masyarakat. Bahkan telah banyaknya kejahatan yang telah ditangani dalam kurun waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dapat mengurangi resiko kegagalan serta ketidakpastian kegiatan ini dilakukan birokrasi agar dalam pelayanan yang akurat dan efisien dan dapat mengalami peningkatan secara kualitas dan kuantitas.

Skripsi ini mengkaji dua masalah yaitu Apakah keberadaan CMS di Kejaksaan Negeri Pamekasan dapat berfungsi secara efektif untuk mengontrol proses jalannya perkara tindak pidana, dan bagaimana kendala yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam menerapkan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan menerapkan kemajuan ilmu teknologi dapat memberikan kemudahan dalam pengoperasian melakukan administrasi perkara sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga tahap eksekusi.

Kata Kunci : Kejaksaan, SPP-TI, Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana

ABSTRACT

The main issue that is a problem in Indonesia is the accumulation of criminal cases that can hinder the implementation of administration, so that effective and realistic changes are needed. With the development of the age of appropriate new information technology science, the Indonesian Attorney's Office has carried out bureaucratic reform as a form of increasing public trust. In fact, there have been many crimes that have been handled over a period of time with the development of information technology science can reduce the risk of failure and uncertainty of this activity carried out by the bureaucracy so that services are accurate and efficient and can increase in quality and quantity.

This thesis examines two problems, namely whether the existence of CMS in the Pamekasan District Attorney can function effectively to control the process of criminal cases, and how the obstacles faced in the Pamekasan District Attorney's Office in implementing the Criminal Case Handling System

The results of the study conclude that by applying advances in science and technology, it can provide convenience in the operation of carrying out case administration since the issuance of the Notification of the Commencement of Investigation (SPDP) until the execution stage.

Keywords: *Prosecutor's Office, SPP-TI, Criminal Case Handling System*